

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 9, menyebutkan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan umum. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Selanjutnya pada Pasal 11, disebutkan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Adapun urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang disebutkan pada pasal 12 Ayat (1) bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; serta sosial.

Dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, penyelenggara daerah wajib memberikan prioritas pelaksanaan pemenuhan standar pelayanan minimal yang didasarkan pada SPM yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM berlaku untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang dirumuskan sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan prioritas nasional dan daerah yang dapat dilaksanakan sesuai dengan prioritas daerah, kemampuan keuangan, kapasitas kelembagaan dan sumber daya personil. Jika SPM mudah dipahami oleh warga dan penyelenggara pelayanan maka mereka akan dapat menggunakannya dengan baik. Warga dapat menggunakan SPM untuk mengetahui hak-hak dasar yang dijamin pemenuhannya oleh pemerintah dan melindungi hak-haknya ketika dilanggar oleh daerah pelayanan (Dwiyanto, 2015: 50-51).

SPM dilaksanakan berdasarkan program dan kegiatan yang sudah diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan suatu daerah. Secara teknis, pemenuhan standar minimal untuk mutu pelayanan dasar tiap bidang SPM dengan menyesuaikan dan

mengacu dengan ketentuan dalam peraturan yang dikeluarkan oleh menteri pelaksana urusan wajib terkait pelayanan dasar. Perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar harus memastikan bahwa pelaksanaan pelayanan dasar menjangkau seluruh warga negara penerima layanan dasar pada tiap bidang SPM. Pemenuhan layanan dasar dapat dilakukan oleh pemerintah daerah secara mandiri melalui penyediaan barang/jasa yang dibutuhkan dan/atau dengan melakukan kerja sama daerah. Berdasarkan pada panduan monitoring dan evaluasi penerapan SPM, penyediaan layanan dasar juga dilaksanakan oleh lembaga nonpemerintah, seperti swasta, masyarakat, atau bahkan perorangan.

Pelayanan dasar yang menjadi salah satu urusan wajib dan berkaitan langsung dengan pemerintah adalah bidang Pekerjaan Umum yang berguna untuk memaksimalkan pelayanan pada bidang infrastruktur dan melaksanakan fungsi pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2019. Organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab pada bidang tersebut, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Lingkungan Hidup untuk melaksanakan pelayanan dasar yang tercantum dalam SPM. SPM air minum dan air limbah merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar air minum dan air limbah yang berhak diterima setiap warga negara secara minimal yang harus diterapkan oleh pemerintah daerah dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing rumah tangga. Regulasi yang mengatur mengenai SPM bidang air minum dan air limbah, yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

SPM merupakan kebutuhan dasar minimal yang seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk rakyatnya, maka SPM menjadi prioritas utama bagi kebutuhan dasar warga negara. Penerapan SPM secara nasional masih belum berjalan dengan optimal, yaitu belum semua penduduk mendapatkan pelayanan yang seharusnya didapat dan disediakan oleh pemerintah untuk suatu perkotaan. Termasuk pada kampung kota, yang dimana belum terlalu diperhatikannya pemenuhan SPM khususnya bidang air minum dan air limbah. Seperti halnya pada salah satu kampung kota yang berada di Kota Bogor, yaitu Kampung Perca. Kampung tersebut merupakan salah satu kampung tematik yang dikembangkan dan digagas oleh pemerintah daerah yang seharusnya diperhatikan juga terkait dengan pemenuhan SPM-nya. Keberadaan kampung tersebut sudah ada

sebelum ditetapkannya menjadi kampung tematik, yang dimana kondisi eksistingnya merupakan permukiman padat penduduk dan belum tentu juga daerah tersebut merupakan daerah yang memang sudah bagus sebelum ditetapkannya menjadi kampung tematik. Pada kenyataannya, Kampung Perca belum terpenuhi SPM-nya secara keseluruhan sehingga dari setiap penduduk yang menetap memiliki inisiatif untuk mencari dan memenuhi kebutuhan air minum secara mandiri dengan cara membeli air galon dan membuat sumur pribadi, serta dalam pengolahan limbahnya dilakukan secara mandiri dari masing-masing rumah tangga dengan membangun cubluk dan tangki septik individual. Adanya Kampung Perca ini seharusnya tidak hanya difokuskan pada pengembangan daya tarik wisata saja, perlu juga diperhatikan terkait dengan ketersediaan pelayanan air minum dan air limbah bagi penduduk sekitar yang menetap pada lokasi penelitian agar mereka mendapatkan haknya sesuai dengan standar minimal yang telah ditetapkan dan tercantum pada regulasi terkait.

1.2 Rumusan Masalah

Penerapan kebijakan mengenai SPM menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan secara serius, baik itu bagi wilayah perkotaan atau perdesaan sekalipun. Masalah pemenuhan SPM tersebut tidak dipungkiri terjadi juga di kampung kota, yang dimana seharusnya diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam memenuhi pelayanan, baik itu air minum dan air limbah, ataupun bidang lainnya. Salah satu kampung kota yang terletak di Kota Bogor, yaitu Kampung Perca yang dimana pada kampung tersebut belum terpenuhi SPM air minum dan air limbah secara sepenuhnya. Kampung Perca merupakan salah satu kampung yang dikembangkan dan digagas oleh pemerintah daerah Kota Bogor yang dimana di setiap kampung tematik itu seharusnya SPM-nya juga terpenuhi dan diperhatikan. Dikarenakan pada lokasi penelitian ini belum sepenuhnya terpenuhi SPM air minum dan air limbah, maka dari setiap penduduk yang menetap diharuskan untuk mencari dan memenuhi kebutuhan air minum secara mandiri dengan cara membeli air galon/kemasan dan membuat sumur pribadi, serta dalam pengolahan limbahnya dilakukan inisiatif dari masing-masing rumah tangga secara mandiri dengan membangun cubluk dan tangki septik individual. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam Tugas Akhir ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan SPM air minum dan air limbah di Kampung Perca Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor sesuai dengan kebijakan yang ada?
2. Bagaimana upaya pemenuhan SPM air minum dan air limbah di Kampung Perca Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor?

1.3 Tujuan dan Sasaran

1.3.1 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pemenuhan SPM air minum dan air limbah di Kampung Perca Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor.

1.3.2 Sasaran

1. Identifikasi pemenuhan SPM air minum dan air limbah di Kampung Perca Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor sesuai dengan kebijakan yang ada.
2. Analisis upaya pemenuhan SPM air minum dan air limbah di Kampung Perca Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian dibagi menjadi dua, yaitu ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup substansi.

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Penelitian ini dilakukan pada salah satu kampung tematik yang ada di Kota Bogor karena berdasarkan informasi yang didapat dari salah satu *stakeholder*, bahwa program yang saat ini sedang dikembangkan oleh pemerintah Kota Bogor salah satunya, yaitu pengembangan kampung tematik yang dimana digagas oleh pemerintah guna untuk memperindah suasana lingkungan di beberapa kampung yang berada di Kota Bogor. Ruang lingkup wilayah penelitian ini berada di Kampung Perca yang terletak di Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor karena kampung tersebut mulai dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor dan penduduk sekitar tahun 2020 yang dimana perlu diperhatikannya pemenuhan SPM yang tersedia agar dapat terpenuhi dan sesuai dengan regulasi terkait mengenai SPM yang ada. SPM yang berkaitan dengan pendidikan yang sedang peneliti tempuh yaitu bidang pekerjaan umum yang dimana mencakup pelayanan air minum dan air limbah. Tujuan dipilihnya bidang air minum dan air limbah itu sendiri yaitu untuk mendukung keberlanjutan kegiatan dan aktivitas yang dilakukan oleh penduduk di Kampung Perca.

1.4.2 Ruang Lingkup Substansi

Sejalan dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai pada kegiatan penelitian, yaitu untuk mengkaji tingkat pemenuhan SPM air minum dan air limbah di Kampung Perca Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Maka ruang lingkup substansi yang akan dibahas dan menjadi batasan pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Identifikasi profil dan kondisi eksisting wilayah Kampung Perca.
2. Identifikasi pemenuhan pelayanan air minum dan air limbah oleh penduduk Kampung Perca berdasarkan:
 - a) Jenis Kelamin
 - b) Usia
 - c) Jenis Pekerjaan dan Jenis Pendapatan perbulan.
3. Identifikasi tingkat kepuasan ketersediaan air minum dan air limbah di lokasi penelitian.
4. Analisis upaya pemenuhan SPM air minum dan air limbah di lokasi penelitian.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat bagi beberapa pihak, baik untuk pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Beberapa manfaat dari penelitian ini diharapkan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pemenuhan SPM bagi pemerintah Kota Bogor dalam penyediaan maupun sebagai evaluasi terhadap pelayanan dasar khususnya pada bidang air minum dan air limbah.
2. Studi ini dapat menjadi bahan dasar penelitian lanjutan yang berkaitan dengan SPM bidang air minum dan air limbah di dalam atau sekitar lokasi penelitian. Selain itu, dapat membantu mahasiswa/masyarakat dalam memahami dan melihat permasalahan mengenai pemenuhan penyediaan SPM air minum dan air limbah.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas 5 bab yang dimana masing-masing bab terdiri atas subbab sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada BAB 1 akan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran penelitian, ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup substansi, manfaat penulisan serta sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB 2 akan diuraikan mengenai teori dan kebijakan terkait dalam studi kali ini. Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk memahami permasalahan dalam penelitian. Adapun teori yang akan digunakan berupa teori tentang pelayanan publik, standar pelayanan minimal, kampung tematik, serta ketentuan dan kebijakan yang berlaku.

BAB 3 METODE PENELITIAN

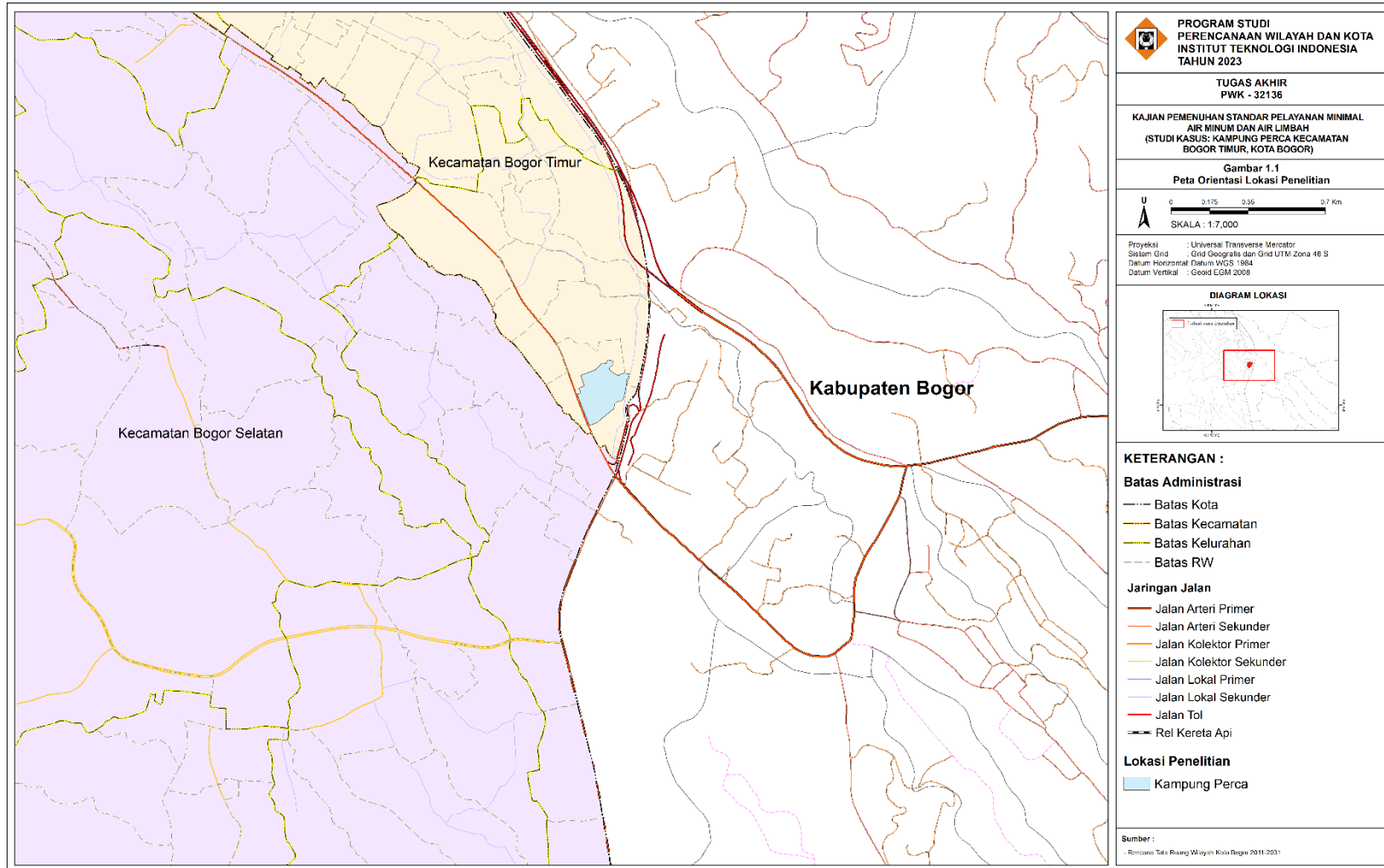
Pada BAB 3 akan diuraikan tentang alur penelitian, metode yang digunakan dalam bentuk jenis penelitian, tempat/lokasi penelitian, alat dan bahan, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik sampling dan metode analisis data.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada BAB 4 akan diuraikan tentang hasil survey dan proses analisis yang sesuai dengan metode yang telah ditetapkan dan juga berdasarkan tinjauan pustaka. Hasil survey dan analisis yang akan dibahas meliputi gambaran umum wilayah penelitian dan analisis ketersediaan bidang air minum dan air limbah di Kampung Perca yang digunakan pada penelitian ini yang berguna untuk menjawab rumusan masalah serta tujuan penelitian.

BAB 5 PENUTUP

Pada BAB 5 akan berisikan kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada BAB 4 sebagai masukan dan referensi bagi Pemerintah Daerah Kota Bogor atas hasil kajian yang dilakukan peneliti pada pemenuhan penyediaan SPM air minum dan air limbah.



Sumber: Hasil Pengolahan Data ArcGIS
Gambar 1.1 Peta Orientasi Lokasi Penelitian